



Evaluasi Dampak Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong (Studi Kasus Madrasah *Piloting*)

Jiabus Sarury¹, Irawanto^{2*}, Misransyah Akos³, Singgih Priono⁴

¹Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, Indonesia

^{2*, 3, 4}STIA Bina Banua Banjarmasin, Indonesia

Corresponding Author: Irawanto irawanto67@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the impact of the Merdeka Curriculum policy and the perceptions of teachers, students, and parents at MAN 1 Tabalong. Using a qualitative case study method, the research involved five key informants, including the acting head of the madrasa, the vice principal for curriculum, and teachers. The findings indicate that the Merdeka Curriculum has been effectively implemented in terms of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy, though challenges remain. These challenges include uneven achievement of student competencies, the need for continuous support, and improvements in infrastructure and facilities. Increased budget allocation is also necessary for optimal implementation. Teachers appreciate the curriculum's flexibility, enabling learning tailored to students' needs and local contexts. Students enjoy active learning through projects aligned with their interests, while parents support the curriculum, viewing it as a comprehensive approach to fostering their children's potential.

Keywords: Policy Evaluation; Merdeka Curriculum; Perceptions of Teachers; Learners; Parents

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak kebijakan Kurikulum Merdeka serta persepsi guru, peserta didik, dan orang tua di MAN 1 Tabalong. Menggunakan metode kualitatif studi kasus, penelitian melibatkan lima informan, termasuk kepala madrasah, wakil bidang kurikulum, dan guru. Hasilnya menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka berjalan baik dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, meski menghadapi tantangan seperti pencapaian kompetensi yang belum merata, kebutuhan pendampingan berkelanjutan, serta peningkatan sarana dan prasarana. Dukungan anggaran juga penting untuk optimalisasi. Guru mengapresiasi fleksibilitas kurikulum yang memungkinkan pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik dan kondisi lokal. Peserta didik menikmati pembelajaran aktif melalui proyek sesuai minat, sementara orang tua mendukung karena kurikulum ini dinilai mampu mengembangkan potensi anak secara lebih menyeluruh.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Kurikulum Merdeka; Persepsi Guru; Peserta didik; Orangtua

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu yang paling signifikan adalah Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini memberikan kebebasan lebih besar bagi sekolah dan madrasah untuk merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Kurikulum Merdeka bertujuan mendorong kreativitas, inovasi, kemandirian, serta pengembangan karakter dan kompetensi melalui pembelajaran berbasis proyek dan penilaian autentik. Kurikulum ini dirancang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2022).

Kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1947 hingga Kurikulum Merdeka tahun 2024. Perubahan ini mencakup berbagai periode, seperti tahun 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 2006, dan 2013 (Imron, 2023). Faktor-faktor seperti politik, sosial, ekonomi, agama, dan perkembangan teknologi memengaruhi setiap perubahan. Pemerintah berharap Kurikulum Merdeka dapat mengatasi tantangan sistem pendidikan, termasuk rendahnya tingkat literasi dan numerasi serta kesenjangan pendidikan antar daerah. Dengan pendekatan yang fleksibel dan berfokus pada pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik, kurikulum ini bertujuan menciptakan generasi muda yang adaptif dan kompetitif secara global.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tabalong menjadi salah satu madrasah piloting berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3811 Tahun 2022 (Pendis, 2022). Evaluasi kebijakan ini penting untuk melihat sejauh mana implementasi Kurikulum Merdeka mencapai tujuannya serta untuk memahami persepsi guru, siswa, dan orang tua. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan berdasarkan model evaluasi kebijakan William Dunn. Dalam penelitian Daryati Dewi Nur Nadila (2023), model ini digunakan untuk mengelola dana BOS di SDN Lidah Kulon dengan hasil yang baik, sementara penelitian Lu Luatul Azizah (2023) mendukung relevansi kriteria tersebut dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka di MAN 1 Tabalong secara umum berjalan baik dalam efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun, beberapa tantangan masih ditemukan, seperti belum meratanya pencapaian kompetensi siswa, kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta kurangnya fasilitas pendidikan. Selain itu, masih ada guru yang cenderung menggunakan metode pembelajaran konvensional, kurang memanfaatkan teknologi, dan minim mengadopsi pembelajaran berbasis proyek.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka diterima positif oleh berbagai pihak. Guru merasa terbantu dengan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan pembelajaran dengan

kebutuhan siswa dan konteks lokal. Siswa menikmati pembelajaran aktif dan menarik melalui proyek berbasis minat. Orang tua mendukung kebijakan ini karena menjanjikan pengembangan anak yang lebih holistik. Namun, untuk mencapai tujuan optimal, diperlukan upaya peningkatan pelatihan guru, penguatan peran komunitas, serta dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai.

Evaluasi ini memberikan wawasan komprehensif tentang implementasi Kurikulum Merdeka di MAN 1 Tabalong. Penelitian ini menyarankan peningkatan di berbagai aspek, termasuk pelatihan guru, keterlibatan orang tua, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Dengan dukungan ini, tujuan Kurikulum Merdeka diharapkan dapat tercapai, menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas tinggi di Indonesia.

B. LITERATURE REVIEW

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian aktivitas atau keputusan yang dirancang pemerintah untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Menurut Fredrich dalam Agustino (2017:166), “kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan dalam lingkungan tertentu untuk mengatasi hambatan atau memanfaatkan peluang demi tujuan yang dimaksud.” Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (Ayuningtyas, 2014:8). Pendapat ini diperkuat oleh Anderson (Agustino, 2017:17), yang menyebut kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan dengan tujuan tertentu, dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor terhadap permasalahan yang diperhatikan.

Kebijakan publik meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup, bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat (Suwitri, 2008). David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for a society*”, mencerminkan kompromi dalam proses politik. Harold Lasswell menyebutnya sebagai “*a projected program of goals, values, and practices*”, menekankan nilai masyarakat dan analisis kebijakan. Sementara itu, Charles E. Lindblom menggambarkan kebijakan sebagai proses “*muddling through*” atau langkah inkremental berbasis *trial and error*. William N. Dunn mendefinisikan kebijakan sebagai “*a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems*”, menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan. James E. Anderson menekankan kebijakan sebagai tindakan terencana oleh aktor untuk

menyelesaikan isu melalui tahap-tahap seperti *agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy evaluation*.

Kebijakan publik penting untuk memberikan arah pembangunan, mengatasi masalah sosial, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Evaluasi kebijakan sangat diperlukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensinya dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. (Abdul Wahab, 2005; Abdul Rahman et al., 2024)

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian penilaian dengan membandingkan sesuatu dengan standar tertentu secara kuantitatif (E. al Akbar, 2018). Nugroho mengutip William N. Dunn, yang menyatakan bahwa evaluasi mencakup penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, termasuk pencapaian kebutuhan dan nilai melalui tindakan publik, serta memberikan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target kebijakan. Evaluasi kebijakan lebih berfokus pada kinerja kebijakan, terutama implementasinya.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan waktunya: sebelum dilaksanakan, saat pelaksanaan (evaluasi proses), dan setelah dilaksanakan (evaluasi konsekuensi atau dampak kebijakan). Evaluasi konsekuensi bertujuan untuk mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat (output dan outcome) setelah kebijakan dilaksanakan. Dunn (1999) mengklasifikasikan pendekatan evaluasi menjadi beberapa kelompok. Evaluasi semu menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan tanpa menilai manfaatnya terhadap masyarakat. Evaluasi formal menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi mengenai hasil kebijakan berdasarkan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, yang dibagi menjadi evaluasi sumatif dan formatif. Evaluasi sumatif mengukur pencapaian tujuan setelah kebijakan selesai, sementara evaluasi formatif dilakukan terus-menerus untuk memantau pencapaian kebijakan. Evaluasi keputusan teoretis menilai hasil kebijakan berdasarkan penilaian pelaku kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan bagian dari *good governance*, yang berperan dalam akuntabilitas pemerintah. Tujuan evaluasi bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengidentifikasi dan mengurangi kesenjangan antara pencapaian dan harapan kebijakan publik.

Model Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan menurut William Dunn adalah aktivitas intelektual yang menghasilkan informasi relevan untuk menganalisis masalah sosial yang muncul akibat kebijakan. Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan menggunakan berbagai metode penelitian untuk menghasilkan informasi yang menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menilai dan memperbaiki kebijakan tersebut.

Dunn mengemukakan beberapa kriteria evaluasi kebijakan, antara lain: pertama, *efektivitas*, yang mengukur apakah suatu kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan. Kedua, *efisiensi*, yang berhubungan dengan jumlah usaha untuk mencapai efektivitas tertentu, biasanya diukur dengan biaya moneter. Ketiga, *kecukupan*, yang menilai sejauh mana kebijakan memuaskan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Keempat, *perataan*, yang mengukur distribusi dampak kebijakan di antara kelompok masyarakat, berkaitan dengan keadilan sosial. Kelima, *responsivitas*, yang menilai sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan atau preferensi masyarakat. Terakhir, *ketepatan*, yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan dengan tujuan yang ditetapkan.

Selain model Dunn, Ernest R. House mengembangkan delapan model evaluasi kebijakan, yang masing-masing memiliki indikator berbeda. Model sistem berfokus pada efisiensi, model perilaku pada produktivitas dan kualitas, model formulasi keputusan pada efektivitas dan kualitas, dan model tujuan bebas pada manfaat sosial. Ada juga model kritik seni yang berfokus pada standar dan kesadaran yang lebih baik, model review profesional yang mengukur penerimaan profesional, model kuasi-legal dengan indikator resolusi, dan model studi kasus dengan fokus pada diversitas (House, 1980). Evaluasi kebijakan ini penting untuk memastikan keberhasilan dan perbaikan kebijakan publik.

Konsep Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah inisiatif pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. Fokus utama kurikulum ini adalah pada pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Sitoningrum, 2023). Berbeda dengan kurikulum konvensional yang lebih menekankan pada penguasaan materi, Kurikulum Merdeka mengutamakan pengalaman belajar yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari dan kemampuan beradaptasi.

Tujuan utama implementasi Kurikulum Merdeka adalah menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi peserta didik, menjadikan mereka sebagai subjek aktif dalam proses

pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan dunia kerja. Selain itu, kurikulum ini juga diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan kehidupan yang cepat berubah (Nugraha, 2022).

Implementasi Kurikulum Merdeka didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kebebasan sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta integrasi pendidikan formal dan non-formal. Penilaian yang holistik juga menjadi bagian penting dalam evaluasi prestasi peserta didik (Damiati et al., 2024). Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi inovasi dan penyesuaian pendidikan dengan keberagaman budaya dan kebutuhan daerah.

Namun, tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka mencakup penyelarasan kurikulum di seluruh jenjang pendidikan, pelatihan bagi pendidik, serta pengukuran dan penilaian yang lebih kompleks untuk mengevaluasi capaian pembelajaran yang mencakup berbagai kompetensi (Fakhrudin et al., 2023).

Dampak yang diharapkan dari Kurikulum Merdeka adalah peningkatan minat belajar peserta didik, keterampilan soft skills yang relevan dengan dunia kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lingkungan global. Manfaat jangka panjangnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan (Nisa & Andaryani, 2023).

Prinsip utama dari Kurikulum Merdeka mencakup kemandirian sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal, pembelajaran berpusat pada peserta didik, integrasi pendidikan formal dan non-formal, pengembangan karakter dan soft skills, penilaian yang holistik, fleksibilitas, dan keberlanjutan serta inovasi. Keterlibatan berbagai stakeholder, seperti guru, orangtua, dan komunitas lokal, sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi kurikulum ini (Iskandar et al., 2023).

Ciri khas Kurikulum Merdeka meliputi pendekatan berbasis kompetensi, penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan budaya, pengembangan karakter peserta didik, serta integrasi antara pendidikan formal dan non-formal. Selain itu, kurikulum ini juga mendorong penerapan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan interaksi dan kreativitas peserta didik (Cholilah et al., 2023). Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan dan holistik, tidak hanya mengukur

pemahaman materi, tetapi juga kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata (Syafriзал, 2023).

Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka memberikan kerangka yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan pendidikan yang berfokus pada kompetensi, karakter, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka dimulai dengan perencanaan yang komprehensif, di mana sekolah dan pihak terkait melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi eksisting, kebutuhan peserta didik, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Hal ini penting untuk menyusun strategi yang efektif dan memastikan kesesuaian dengan visi dan misi sekolah (Gumilar et al., 2023). Setelah itu, langkah berikutnya adalah memberikan pelatihan kepada guru-guru mengenai konsep, prinsip, dan metodologi Kurikulum Merdeka. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pengembangan soft skills dan karakter peserta didik, yang menjadi salah satu fokus kurikulum (Cholilah et al., 2023). Selain itu, pengembangan materi pembelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum juga sangat penting, meliputi penyesuaian silabus, pembuatan modul, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan relevansi pembelajaran (Hartutik & Aim Abdulkarim, 2024).

Implementasi Kurikulum Merdeka juga menuntut keterkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik. Pembelajaran harus dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial-budaya, dengan melibatkan kegiatan luar kelas seperti magang atau proyek kolaboratif yang relevan dengan kurikulum (Nurasiah et al., 2022). Monitoring dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menilai efektivitas implementasi kurikulum, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal (Rumasukun et al., 2024). Selain itu, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, seperti orangtua, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan lainnya, sangat penting untuk mendukung implementasi kurikulum dalam konteks yang lebih luas dan membangun dukungan yang diperlukan (Junaidi et al., 2023).

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kurikulum Merdeka antara lain kebijakan pendidikan nasional, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), serta pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik. Kebijakan pemerintah yang jelas memberikan dasar hukum yang mendukung pelaksanaan kurikulum

ini. Sumber daya yang memadai, termasuk infrastruktur pendidikan dan guru yang terlatih, menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi (Sumual et al., 2023; Munawir et al., 2022). Partisipasi aktif dari stakeholder juga memperkuat komitmen terhadap perubahan pendidikan yang lebih menyeluruh, sementara pemahaman yang mendalam dari guru tentang filosofi dan strategi kurikulum memastikan implementasi yang efektif (A. D. K. Putri & Imaniyati, 2017).

Penilaian dan Evaluasi dalam Kurikulum Merdeka

Konsep penilaian dan evaluasi dalam Kurikulum Merdeka menekankan pendekatan holistik yang tidak hanya mengukur pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga perkembangan soft skills seperti kreativitas, kolaborasi, dan kepemimpinan. Pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21 (Rini et al., 2023). Kurikulum ini mengintegrasikan penilaian formatif dan sumatif; penilaian formatif memberikan umpan balik berkelanjutan selama proses pembelajaran, sementara penilaian sumatif mengevaluasi pencapaian peserta didik pada akhir periode pembelajaran (F. Putri & Zakir, 2023). Evaluasi yang dilakukan juga terkait erat dengan standar kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan (Resa, 2023).

Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan berbagai instrumen evaluasi, seperti ujian tertulis, proyek kolaboratif, portofolio, dan presentasi, untuk mengevaluasi berbagai aspek kemampuan peserta didik (Aransyah et al., 2023). Selain itu, evaluasi dalam kurikulum ini juga menilai proses belajar, di mana guru mengamati perkembangan peserta didik, mengidentifikasi kesulitan, dan memberikan dukungan yang sesuai. Evaluasi ini mendukung pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif yang menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses dan kemampuan kerja sama antar peserta didik (Kamaruddin et al., 2023). Evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan, memungkinkan perbaikan dan pengembangan kurikulum yang lebih baik (Syafrizal, 2023).

Jenis-jenis penilaian dalam Kurikulum Merdeka meliputi penilaian formatif yang memberikan umpan balik berkelanjutan melalui tugas singkat dan kuis (F. Putri & Zakir, 2023), penilaian sumatif yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian peserta didik pada akhir periode pembelajaran, dan penilaian berbasis portofolio yang menggambarkan kemajuan peserta didik melalui bukti kinerja (Damiati et al., 2024). Selain itu, ada juga penilaian berbasis proyek yang menekankan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata dan kolaborasi (Damiati et

al., 2024), serta penilaian observasional yang menilai partisipasi dan interaksi peserta didik (Widawati et al., 2023).

Peran penilaian dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sangat penting. Penilaian berbasis bukti membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik (Lestari et al., 2023), sementara evaluasi memungkinkan guru untuk memahami kemajuan peserta didik dan menyesuaikan strategi pengajaran mereka (Widad & Syauqillah, 2023). Evaluasi juga mendorong refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam pembelajaran, menyediakan umpan balik konstruktif yang tidak hanya terkait dengan aspek akademis, tetapi juga keterampilan sosial dan emosional (Muqorobin, 2023). Selain itu, evaluasi mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam sistem pendidikan (Suparjan & Nurnaningsih, 2020).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi dampak kebijakan Kurikulum Merdeka di MAN 1 Tabalong, madrasah piloting di Kalimantan Selatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan terkait penerapan kebijakan tersebut, termasuk faktor internal dan eksternal serta tantangan yang dihadapi. Lokasi penelitian dipilih karena MAN 1 Tabalong merupakan salah satu madrasah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3811 Tahun 2022. Subjek penelitian melibatkan Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, guru, peserta didik, dan orang tua. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn. Dampak kebijakan didefinisikan sebagai perubahan dalam proses pembelajaran, kualitas pendidikan, dan hasil belajar peserta didik. Metode evaluasi ini mencakup formulasi masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini mencapai tujuannya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi atau diagram, penarikan kesimpulan, verifikasi data, dan triangulasi data untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan

wawasan mendalam dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan pendidikan di Indonesia.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektifitas

Daryati (2023) mendefinisikan efektifitas sebagai pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan Kurikulum Merdeka di MAN 1 Tabalong memiliki dampak positif, terutama dalam mendorong kreativitas guru dengan memberi fleksibilitas dalam merancang pembelajaran yang lebih relevan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Namun, tantangan utama adalah kurangnya pencapaian kompetensi yang merata di kalangan peserta didik, disebabkan oleh perbedaan kemampuan adaptasi terhadap pembelajaran fleksibel. Evaluasi kebijakan menurut William Dunn menunjukkan kebijakan ini efektif, tetapi masih kurang efisien dalam memastikan kompetensi merata. Pendampingan intensif bagi peserta didik diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Efisiensi

Lu Luatul Azizah (2023) menjelaskan bahwa efisiensi mengukur hubungan antara efektivitas dan biaya yang dikeluarkan. Di MAN 1 Tabalong, alokasi sumber daya untuk Kurikulum Merdeka sudah maksimal, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Pengajaran fleksibel membutuhkan waktu ekstra untuk persiapan materi, sementara beban kerja guru meningkat karena pelatihan intensif dan evaluasi kurikulum. Kekurangan tenaga pendukung menghambat efektivitas modul, sehingga diperlukan tambahan staf. Biaya yang diperlukan untuk teknologi, pelatihan, dan fasilitas masih membutuhkan perhatian. Pengelolaan dana yang lebih baik serta perbaikan dalam manajemen waktu dan dukungan tenaga pengajar akan membantu mencapai efisiensi lebih baik.

Kecukupan

Lu Luatul Azizah (2023) merujuk pada kecukupan yang berkaitan dengan kemampuan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun MAN 1 Tabalong telah berupaya melaksanakan Kurikulum Merdeka, keterbatasan sumber daya menjadi kendala. Kebutuhan pelatihan lebih lanjut, perangkat digital, dan ruang belajar yang memadai masih perlu dipenuhi. Anggaran terbatas memperburuk situasi, menghambat pembaruan fasilitas dan pelatihan. Sekolah berusaha mencari solusi

kreatif dan kolaborasi eksternal untuk mengatasi keterbatasan ini. Diperlukan dukungan tambahan dalam bentuk tenaga pengajar, teknologi, dan anggaran untuk memastikan implementasi yang efektif.

Perataan

Nadia Apriani dkk. (2019) menjelaskan bahwa perataan berkaitan dengan distribusi pelayanan yang adil. Penerapan Kurikulum Merdeka di MAN 1 Tabalong berkomitmen pada prinsip perataan dengan memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan peserta didik. Namun, tantangan utama adalah variasi kesiapan dan akses di antara peserta didik, serta keterbatasan sumber daya. Meskipun sudah diterapkan langkah-langkah seperti bimbingan tambahan dan penyesuaian kurikulum, kesenjangan dalam dukungan yang merata masih perlu diatasi. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan penting untuk memastikan semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang adil untuk belajar.

Responsivitas

Nadia dkk. (2021) menyatakan bahwa responsivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan untuk memuaskan kebutuhan kelompok tertentu. Kebijakan Kurikulum Merdeka di MAN 1 Tabalong telah berupaya menanggapi kebutuhan guru, peserta didik, dan orang tua. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan penyesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Meskipun sudah ada pelatihan dan materi pendukung, masih diperlukan dukungan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan penerapan kurikulum. Pendekatan berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat mereka, tetapi dukungan individual masih diperlukan. Orang tua mendukung kebijakan ini, meskipun mereka mengharapkan komunikasi lebih baik tentang perubahan kurikulum.

Ketepatan

Ade Kurniawan dkk. (2020) menjelaskan ketepatan sebagai kecocokan kebijakan dengan kebutuhan sasaran. Kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas dalam penyesuaian materi dan metode pengajaran, yang membantu membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Di MAN 1 Tabalong, kurikulum ini juga mengintegrasikan budaya lokal, namun masih ada tantangan dalam keterbatasan fasilitas dan pelatihan berkelanjutan bagi guru. Penyesuaian dengan kondisi lokal penting, namun masalah seperti ketidakmerataan akses terhadap teknologi dan

kesiapan peserta didik dalam menghadapi metode baru harus segera ditangani.

Persepsi Guru, Peserta Didik, dan Orang Tua

Anwar (2022) mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk lebih kreatif. Persepsi guru, peserta didik, dan orang tua terhadap penerapan Kurikulum Merdeka di MAN 1 Tabalong secara umum positif. Guru melihat fleksibilitas sebagai peluang untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik menikmati pembelajaran interaktif berbasis proyek, tetapi ketidakmerataan penerapan di kelas dan mata pelajaran menjadi hambatan. Orang tua mendukung kebijakan ini karena potensi besar dalam pengembangan anak, meskipun mereka mengharapkan penerapan yang lebih merata dan komunikasi yang lebih baik mengenai perubahan kurikulum. Keberhasilan kebijakan ini memerlukan peningkatan pelatihan guru dan konsistensi penerapan.

E. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi dampak kebijakan Kurikulum Merdeka di MAN 1 Tabalong penting dilakukan untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut. Penulis menggunakan model evaluasi kebijakan dari William Dunn (Agustino, 2008:187), yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan pelaksanaan. Secara umum, kebijakan ini berjalan baik, meskipun ada tantangan, seperti belum meratanya pencapaian kompetensi peserta didik, kebutuhan pendampingan berkelanjutan, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Peningkatan anggaran juga diperlukan agar tujuan kurikulum tercapai secara optimal.

Kurikulum Merdeka di MAN 1 Tabalong disambut positif oleh guru, peserta didik, dan orang tua, yang menghargai fleksibilitas dan pendekatan pembelajaran aktif yang disesuaikan dengan minat masing-masing. Namun, tantangan muncul karena sebagian guru belum terbiasa dengan metode baru ini, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pelatihan lebih lanjut bagi guru diperlukan.

Untuk meningkatkan dampak positif kebijakan ini, penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian pembelajaran agar pencapaian kompetensi peserta didik lebih merata. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti teknologi dan ruang kelas yang fleksibel, juga sangat diperlukan. Selain itu, peningkatan anggaran pendidikan dan

keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran akan memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka secara optimal dan mendukung pengembangan potensi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rhaman, Tukiyat, Aos Kuswandi, Ayuning Budiati, Balthasar Watunglawar, Rulinawaty, Septiana Dwiputrianti, & Ipah Erna Jumiaty. (2024). *Birokrasi & Kebijakan Publik, Catatan Konsep dan Teori*
- Akbar, E. al. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesi. In *Ideas Publishing* (Nomor March).
- Akbar, I. (2023). Paradigma Yang Membentuk Kreativitas Peserta Didik Ditinjau Dari Karakteristik Kurikulum Merdeka. *Prosiding Seminar nasional PSSH*, 2, 8.1- 8.10.
- Alfaeni, S. I., & Asbari, M. (2023). Kurikulum Merdeka: Fleksibilitas Kurikulum bagi Guru dan Peserta didik. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(5).
- Aransyah, A., Herpratiwi, H., Adha, M. M., Nurwahidin, M., & Yuliati, D. (2023). Implementasi Evaluasi Modul Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak Terhadap Peserta Didik SMA Perintis 1 Bandar Lampung. *Jurnal Teknologi Pendidikan: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembelajaran*, 8(1), 136. <https://doi.org/10.33394/jtp.v8i1.6424>
- Cholilah, M., Tatuwo, A. G. P., Komariah, & Rosdiana, S. P. (2023). Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(02), 56–67. <https://doi.org/10.58812/spp.v1i02.110>
- Damiati, M., Junaedi, N., & Asbari, M. (2024). Prinsip Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(2), 11–16.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Pulblik. In *Gadjah Mada Universitas Press* (hal. 1–710). <https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-pulblik-e176089208.html>
- Fakhrudin, I. A., Probosari, R. M., Indriyani, N. Y., Khasanah, A. N., & Utami, B. (2023). IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN STEM DALAM KURIKULUM MERDEKA: PEMETAAN KESIAPAN, HAMBATAN DAN TANTANGAN PADA GURU SMP. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.35906/resona.v7i1.1266>
- Fitriah, H. (2020). Peran Perpustakaan Digital Di Era Millinea. *EFISIENSI*

KEBUTUHAN PEMUSTAKA DENGAN ADANYA TEKNOLOGI
INFORMASI

PERPUSTAKAAN Nasrul, 8. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/15100>

Gumilar, G., Rosid, D. P. S., Sumardjoko, B., & Ghufron, A. (2023). Urgensi Penggantian Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 5(2), 148–155. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v5i2.4528>

Harahap, G. (2018). KONSEP KOMUNIKASI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(2), 143. <https://doi.org/10.24014/jdr.v29i2.6358>

Hartutik, & Aim Abdulkarim. (2024). Analisis Terhadap Implementasi dan Pengembangan Sumber Belajar IPS Masa Transisi K13 Ke Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Pertama. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 1091–1102. <https://doi.org/10.58230/27454312.359>

Imron, A. (2023). The Implementation of Merdeka Curriculum in Piloting Madrasa; A Case Study at State Madrasah Ibtidaiyah of Semarang City. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 10(2). <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v10i2.14749>

Iskandar, S., Rosmana, P. S., Novitasari, D., & Khaerunnisa, H. (2023). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Salah Satu Sekolah Penggerak Kabupaten Purwakarta. *Journal Of Social Science Research*, 3, 2551–2559.

James W, Elston D, T. J. et al. (20M). Pengertian Dampak Menurut Para Ahli. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*.

Junaidi, Sileuw, M., & Faisal. (2023). Integrasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Indonesian Journal of Teaching and Teacher Education*, 40–47. <https://doi.org/10.58835/ijtte.v3i2.253>

Kamaruddin, I., Suarni, E., Rambe, S., Sakti, B. P., Rachman, R. S., & Kurniadi, P. (2023). Penerapan model pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan: tinjauan literatur. *Jurnal Review Pendidikan dan pengajaran*, 6, 2742–2747. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>

Kholis, N., Zamroni, Z., & Sumarno, S. (2014). MUTU SEKOLAH DAN BUDAYA PARTISIPASI STAKEHOLDERS. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(2). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i2.2639>

Lestari, P. D. J. P., Bahrozi, I., & Yuliana, I. (2023). Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Review*

- Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 9(3), 153–160. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v9n3.p153-160>
- Marisa, M. (2021). Inovasi Kurikulum “Merdeka Belajar” di Era Society 5.0. *Santhet: (Jurnal sejarah, Pendidikan dan Humaniora)*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>
- Maulida, U. (2022). Pengembangan Modul Ajar Berbasis Kurikulum Merdeka. *Tarbawi : Jurnal pemikiran dan Pendidikan Islam*, 5(2), 130–138. <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v5i2.392>
- Mega, D., Oktavianti, P., & Effane, A. (2023). Kepemimpinan Sekolah. *Karimah Tauhid*, 2(1), 168–174.
- Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. 112.
- Munawir, M., Aliya, N., & Bella, Q. S. (2022). Pengembangan Profesi dan Karir Guru. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(1), 75–83. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i1.339>
- Muqorobin. (2023). *Tantangan Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka*. kspstendik kemdikbud. <https://kspstendik.kemdikbud.go.id/read-news/tantangan-dalam-penerapan-kurikulum-merdeka>
- Nisa, A. W., & Andaryani, E. T. (2023). Peran Dan Manfaat Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Jenjang Sekolah Dasar. *Simpati: Jurnal Penelitian ...*, 1(4). <https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/simpati/article/view/441>
- Nugraha, J. (2022). *Mengenal Tujuan Kurikulum Merdeka, Pahami Bedanya dengan Kurikulum Sebelumnya*. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-tujuan-kurikulum-merdeka-dan-penjasannya-perlu-diketahui-klh.html>
- Nurasiah, I., Marini, A., Nafiah, M., & Rachmawati, N. (2022). Nilai Kearifan Lokal: Projek Paradigma Baru Program Sekolah Penggerak untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3639–3648. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2727>
- Pendis, D. (2022). *Kepdirjen Pendis*. 3.
- Pertiwi, A. D., Nurfatimah, S. A., & Hasna, S. (2022). Menerapkan Metode Pembelajaran Berorientasi Student Centered Menuju Masa Transisi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8839–8848.
- Putri, A. D. K., & Imaniyati, N. (2017). PENGEMBANGAN PROFESI GURU

- DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 2(2), 93.
<https://doi.org/10.17509/jpm.v2i2.8109>
- Putri, F., & Zakir, S. (2023). Mengukur Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran: Telaah Evaluasi Formatif Dan Sumatif Dalam Kurikulum Merdeka. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(4), 172–180.
<https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i4.1783>
- Resa, A. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Berdasarkan Pendekatan Understanding by Design. *Jurnal Primary*, 4(1), 31–41.
<https://ejournal.stkipgri-sidoarjo.ac.id/index.php/psd/article/download/444/359>
- Rini, A. P., Firmansyah, N. F., Widiastuti, N., Christyowati, Y. I., & Fatirul, A. N. (2023). Pendekatan Terintegrasi dalam Pengembangan Kurikulum Abad 21. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 2(2), 171–182. <https://doi.org/10.55927/jiph.v2i2.3942>
- Rosmawati, R., Ahyani, N., & Missriani, M. (2020). Pengaruh Disiplin dan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Guru. *Journal of Education Research*, 1(3). <https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.22>
- Rumasukun, N. A., Faizin, M., & Apia, G. (2024). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 02 Waisai. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 6(1), 13–22.
<https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v6i1.5220>
- Sitoningrum, N. D. (2023). Kurikulum Merdeka Belajar: Pengertian, Tujuan, Karakteristik, hingga Keunggulannya. In *Detik.Com* (hal. 1–1).
- Sumual, S. D. M., Tuerah, P. R., Pontoh, L. F., Taroreh, O., Repi, F., & Mesra, R. (2023). Implikasi Terbatasnya Infrastruktur Dalam Upaya Mencapai Tujuan Pendidikan. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2).
<https://doi.org/10.58258/jupe.v8i2.5261>
- Sunarti Rahman. (2021). PENTINGNYA MOTIVASI BELAJAR DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*.
- Suparjan, E., & Nurnaningsih, N. (2020). INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER, REVOLUSI MENTAL DAN NILAI-NILAI BUDAYA BIMA. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 4(2).
<https://doi.org/10.52266/tadjid.v4i2.519>

- Suparjan, E., & Nurnaningsih, N. (2020b).
INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER, REVOLUSI
MENTAL DAN NILAI-NILAI BUDAYA BIMA.
TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 4(2), 159–167.
<https://doi.org/10.52266/tadjid.v4i2.519>
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.
- Syafrizal, T. (2023). Analisis implementasi kurikulum merdeka dalam perspektif teori belajar humanistik di MTSN 3 dan MTSN 19 Jakarta tesis.
Repository.Uinjkt.Ac.Id, 130.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74388%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74388/1/21200181000035-Tomy Syafrizal.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74388%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74388/1/21200181000035-Tomy%20Syafrizal.pdf)
- Widad, Z., & Syauqillah, M. (2023). KONSEP GURU IDEAL PERSPEKTIF AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA' ULUMUDDIN. *Journal Islamic Studies*, 4(2), 99–110. <https://doi.org/10.32478/jis.v4i2.2030>
- Widawati, C. W., Suhita, R., & ... (2023). Implementasi Modul Ajar Laporan Hasil Observasi Kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia di Surakarta: Studi Kasus. ... , *SAINS, PENDIDIKAN*
- Widodo, J. W., & Chakim, N. (2023). Formative Peer-Assessment in Oral Presentation Skill: EFL Secondary School Students' Perception and Its Challenges. *Prosodi*, 17(1), 41–57.
<https://doi.org/10.21107/prosodi.v17i1.147>